

## 10 Bangunan Vila di Kawasan Puncak Segera Dibongkar Satpol PP Kab. Bogor

**CISARUA (IM)**- Satpol PP Kabupaten Bogor dalam waktu dekat akan menertibkan 10 bangunan vila di kawasan Puncak yang melanggar aturan garis sepadan sungai (GSS). Hal itu, merupakan permintaan balai besar wilayah sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane. Penertiban 10 bangunan vila di kawasan Puncak itu dilakukan demi mengurangi risiko bencana banjir dan longsor.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bogor Wawan Darmawan menegaskan, penertiban 10 bangunan vila di kawasan Puncak itu pun untuk mengembalikan fungsi lahan dan memperbaiki serapan air di kawasan Puncak. "Kami dalam waktu dekat akan membongkar 10 bangunan vila di kawasan Puncak yang melanggar aturan GSS. Sebelumnya kami sudah memberikan surat peringatan ketiga," ucap Wawan kepada wartawan, Selasa (9/8).

Wawan menearangkan, pembongkaran bangunan vila yang melanggar aturan GSS juga merupakan atensi Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. "Pembongkaran bangunan vila di Kecamatan Megamendung dan Cisarua ini merupakan

hasil limpahan pelanggaran Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, yang sebelumnya diminta oleh tiga kementerian terkait," terang Wawan Darmawan.

Kepada pemilik vila, ia meminta lahan sepadan sungai dibangun turap atau tanggul penahan tanah hingga tidak terjadi bencana longsor. Selain penertiban atau pembongkaran, jajarannya juga melakukan tindakan persuasif. "Kami minta lahan dialih fungsikan kembali menjadi ruang terbuka hijau, lalu dibangun turap di tepi sungainya. Pemkab Bogor juga akan memasang plang himbauan, larangan membangun di GSS," pintanya.

Sementara itu, Kepala UPT Penataan Bangunan II DPKPP Kabupaten Bogor, Agung Tarmedi menambahkan Pemkab Bogor memberikan waktu agar pemilik vila yang melanggar aturan GSS, untuk membongkar mandiri bangunannya. "Sebelum dibongkar Satpol PP, kami memberikan waktu agar pemilik vila yang melanggar aturan untuk membongkar mandiri atau sendiri bangunannya. Akhir Bulan Agustus atau awal September, kami akan melakukan pembongkaran," tambah Agung. ● **gio**

## Bus MGI Jurusan Pelabuhan Ratu-Bogor, Terbakar di Gerbang Tol Ciawi

**KAB. BOGOR (IM)**- Bus MGI jurusan Pelabuhan Ratu-Bogor, terbakar di Gerbang Tol Ciawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selasa (9/8).

Komandan Pemadam Kebakaran Sektor Ciawi, Nendri mengungkap, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk memadamkan api, pihaknya harus menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran.

"Tadi terima laporan jam 8 kurang 15. Berhasil dipadamkan sekitar jam 10 menggunakan dua unit mobil damkar

Sektor Ciawi. Tadi regu dua yang menangani jumlahnya 12 orang," kata Nendri.

Pihaknya pun berkoordinasi dengan Polres Bogor, untuk mengidentifikasi kebakaran pada bus bernomor polisi F 7500 UD itu. "Alhamdulillah tidak ada korban. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kami juga sudah koordinasi dengan Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk proses pemadaman api berjalan aman dan lancar," pungkasa dia. ● **gio**

IDN/ANTARA



PEMBUATAN MURAL SAMBUT HARI KEMERDEKAAN

Warga menyelesaikan pembuatan mural yang bertema tentang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (9/8/2022). Pembuatan mural yang dananya berasal dari swadaya warga, dibuat dalam rangka memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

URAI KEMACETAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA

## Rancamanyar Butuh Penambahan Jembatan

**BANDUNG (IM)**- Terkait kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Rancamanyar, Pemkab Bandung meyakini penambahan kapasitas jembatan merupakan solusi.

Kepala Dishub Kabupaten Bandung, Iman Irianto mengatakan, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Rancamanyar itu seharusnya harus ada penambahan kapasitas jembatan dan jalan yang dilalui.

"Di situ, kapasitas jembatan harus ditambah karena menampung kendaraan dari Kabupaten Bandung yang ke Kota Bandung dan sebaliknya. Idealnya, beberapa meter dari jembatan lama dibangun lagi jembatan. Jadi, sebenarnya kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Rancamanyar itu ada penyebabnya," katanya, Selasa (9/8).

Iman menuurkan, kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Rancamanyar itu tak hindarkan khususnya pada saat jam-jam sibuk. Seperti pagi hari dari pukul 08.00-09.00 WIB saat banyak warga hendak berangkat kerja dan sekolah.

Selama ini, kata Iman, Dishub telah melakukan berbagai langkah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tentunya sesuai dengan fungsi dan tugas kami, bermitra dengan teman-teman di Kepolisian. Dalam hal ini Polisi lalu lintas. Di antaranya menyiapkan personel atau penambahan personel di jam-jam rawan kepadatan atau kemacetan," ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya personel di lokasi titik rawan kemacetan itu, terutama pada pagi hari, lalu lintas kendaraan relatif tertib. "Langkah selanjutnya, melakukan rekayasa lalu lintas dengan dukungan sarana memakai traffic cone. Lalu lintas kendaraan pun lebih tertib," katanya.

Terkait jembatan, lanjut Iman, hal tersebut menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Karena jembatan tersebut meski masih berada di wilayah Kabupaten Bandung, tapi menjadi penghubung menuju Kota Bandung.

"Karena penghubung kabupaten dan kota, jembatan itu kewenangannya ada di Pemrov Jabar. Tapi untuk di Kabupaten Bandung, jangkauan Kadis PUTR, Pak Bupati juga sudah atensi hal itu dan beliau pun sudah mendatangi Kadis Binamarga Jabar. Itu sudah beberapa bulan lalu," katanya. ● **pur**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

## PENETAPAN GUBERNUR DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X (tengah) memberikan pemaparan kepada media sesuai Rapat Paripurna DPRD DIY dalam rangka penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa Jabatan 2022-2027 di Kantor DPRD DIY, Yogyakarta, Senin (9/8). Dalam rapat paripurna itu DPRD DIY menetapkan Sri Sultan HB X dan KGPAA Paku Alam X menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa Jabatan 2022-2027 setelah 16 syarat yang ditetapkan dalam UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY sudah lengkap dan memenuhi syarat.

## Nggak Mengagetkan Bakal Ada Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di PT PPE Bogor

Sejak lama gonjang ganjing hukum di tubuh PT PPE tersebut terdengar. Namun sempat 'lenyap' dari peredaran. Munculnya informasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor bakal menetapkan tersangka, semakin menambah daftar panjang kasus hukum yang menyelumuti Pemkab Bogor, kata pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi.

**CIBINONG (IM)**- Kasus dugaan korupsi di PT Prayoga Pertambangan Energi atau PT PPE tak membuat banyak pihak kaget.

Pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi tidak terkejut kabar Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang bakal menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi di PT Prayoga Pertambangan

Energi atau PPE.

"Sudah lama tidak mendengar bagaimana proses hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi di PT PPE. Ketika mendapatkan informasi akan segera ditetapkan tersangkanya, tentu saja ini kabar yang tidak begitu mengejutkan," kata Yusfitriadi kepada wartawan, Selasa (9/8).

Menurutnya, sejak lama

gonjang ganjing hukum di tubuh PT PPE, salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemkab Bogor tersebut terdengar. Namun sempat 'lenyap' dari peredaran.

Munculnya informasi ini, sambung Yusfitriadi, semakin menambah daftar panjang kasus hukum yang menyelumuti Pemkab Bogor. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Cibinong sudah menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE).

Dugaan kerugian di badan usaha mik daerah (BUMD) milik Pemkab Bogor tersebut, jumlahnya hampir mencapai Rp 10 miliar. Di mana terjadi mulai Tahun 2013 hingga 2019 lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Agustian Sunaryo mengatakan bahwa dugaan kasus yang sudah ta-

hap penyidikan tersebut, masih menunggu persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Asep Nana Mulyana.

"Kami sudah bersurat dan menunggu persetujuan Kepala Kejati Jawa Barat, untuk menetapkan tersangka dalam dugaan kasus Tipikor di PT. PPE," kata Agustian Sunaryo kepada wartawan, Senin, (8/8).

Berbeda dengan kasus Tipikor lainnya, maka ekpose penetapan tersangka dugaan kasus Tipikor di PT. PPE akan dilakukan oleh Kejati Jawa Barat di Kota Bandung.

"Kami bersama Kejati Jawa Barat akan ekpose di sana (untuk dugaan kasus Tipikor) PT. PPE. Lamanya perhitungan kerugian ini, dikarenakan beberapa kendala yang ada di BPK RI," sambung Agustian Sunaryo.

Informasi yang dihimpun, PT. PPE secara bertahap diberikan penyertaan modal hingga

Rp 164 miliar. Namun bukannya menyetor laba atau untung ke Pemkab Bogor, perusahaan berplat merah tersebut mengalami wanprestasi, hingga digugat oleh rekanan usahanya

Akibat merahnya raport PT. PPE, mantan Bupati Bogor, Nurhayanti, sejumlah mantan Direksi PT. PPE, mantan Kepala Dinas energi sumber daya mineral (ESDM) dan juga Direksi PT. PPE yang baru ikut diperiksa atau diminta keterangan oleh BPK RI dan juga Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

Dugaan kasus Tipikor ini berdampak terhadap operasional PT. PPE, yang direktur utamanya sudah berganti, dari Radjab Tampubolon ke Agus Setiawan. Sisa penyertaan modal sebesar Rp 36 miliar, hingga saat ini belum dicairkan oleh Pemkab Bogor karena menunggu kasus ini selesai di ranah hukum. ● **pra**

## Senam Merdeka PWI Kab. Bogor Bakalan Banjir Door Prize

**BOGOR (IM)** - Senam Merdeka Bogor bakal banjir door prize. Hal ini karena, Polres Bogor membeberikan sebuah motor dan Pemkab Bogor melalui dinas juga akan memberikan hadiah di kegiatan Senam Merdeka yang digagas PWI Kabupaten Bogor, tanggal 2 September mendatang.

Saat ditemui Ketua PWI Kabupaten Bogor dan panitia HUT RI ke 77, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengapresiasi kegiatan PWI Kabupaten Bogor ini.

"Insya Allah siap untuk door prize sebuah motor, nanti langsung e bu AKBP Ita Puspita Lena, kata Kapolres Bogo, AKBP DR Iman Imanuddin, sambil melihat Ita yang juga Humas Polres Bogor.

Hal sama juga dikatakan Sekda Kabupaten Bogor, yang akan memerintahkan semua unit dinas di lingkungan Pemkab Bogor ikut membantu door prize pada senam merdeka yang digelar PWI Kabupaten Bogor itu.

"Nanti saya perintahkan kepada Unit Dinas di lingkungan Pemkab Bogor untuk membantu door prize Senam Merdeka," tegas Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin, seuaai pimpin apel pagi di Pemkab Bogor, Senin (8/8), seraya memanggil bagian umum Pemkab Bogor, agar diinformasikan kepada unit-unit dinas di lingkungan Pemkab Bogor.

Sebelumnya puncak kegiatan peringatan HUT RI ke 77, rangkaian kegiatan PWI diawali dengan kejuaraan, catur, gaple, dan mancing manik.

Untuk Senam Merdeka yang menjadi puncak HUT kemerdekaan ke 77 RI, peserta direncanakan dari dinas ASN Pemkab Bogor, Kajari, Polres Bogor, Kodim, Pengadilan, BPN, Perumda dan unsur lainnya.

Pilihan kegiatan Senam Merdeka oleh PWI Kabupaten Bogor, sebagai bentuk kecintaan kepada NKRI akan pentingnya kemerdekaan bagi negara republik Indonesia," ungkap ketua PWI Kabupaten Bogor Subagiyo. ● **gio**

MAJUKAN PENGUSAHA MUDA DAN UMKM

## Samakan Persepsi, Hipmi dan Kadin Kota Bogor Siap Berkolaborasi

**BOGOR (IM)**- Hipmi dan Kadin Kota Bogor menyamakan persepsi terkait program kerja untuk memajukan pengusaha muda dan UMKM setempat.

Usai kunjungan ke Graha Kadin Kota Bogor, Hipmi dan Kadin Kota Bogor akan berkolaborasi untuk bermitra guna memajukan pengusaha muda dan UMKM lokal.

Ketua Hipmi Kota Bogor, Marwan Suherwan mengatakan, silaturahmi Hipmi dan Kadin Kota Bogor disambut baik Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi dan jajaran pengurus lainnya. Mereka pun ingin menciptakan pengusaha muda dan UMKM mumpuni.

Marwan memaparkan, ke depan Graha Kadin Kota Bogor akan menjadi wadah semua or-

ganisasi anggota luar biasa (ALB) di bawah Kadin untuk bisa bersinergi membangun satu visi ke depan yang memang satu tujuan.

"Pertemuan selanjutnya saya akan lebih intens berkomunikasi dengan Ketua Almer juga pengurus lain, mungkin dengan wakil ketua kadin juga. Untuk program kerja ke depan masih belum ada. Nanti akan kami bahas apa yang bisa kami sinergikan dengan Kadin Kota Bogor ke depan untuk memajukan pengusaha muda dan UMKM Kota Bogor," kata Marwan, Selasa (9/8).

Sejauh ini, Hipmi dan Kadin Kota Bogor gencar menciptakan pengusaha-pengusaha muda dan UMKM setempat untuk berkembang. ● **gio**



IDN/ANTARA

SISWA MENYEBERANGI SUNGAI DENGAN RAKIT BAMBUI

Siswa menaiki rakit bambu saat akan menyeberangi sungai Ciberang di Desa Haugajrug, Lebak, Banten, Selasa (9/8). Putusnya akses jembatan gantung di desa tersebut mengakibatkan siswa terpaksa menyeberangi sungai setiap harinya menggunakan rakit dari bambu sehingga membahayakan keselamatan mereka.